



PENGUATAN KETERLIBATAN WARGA NEGARA MELALUI PEMERINTAH DESA TERWUJUDNYA *GOOD GOVERNANCE*

¹Luluk Masruroh Zuhriyah

Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

*Corresponding Author; luluk@unikama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penguatan keterlibatan warga negara melalui Pemerintah Desa untuk mewujudkan *good governance*. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dengan memilih jenis penelitian studi kasus, kemudian menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data di triangulasi untuk keabsahan data. Berdasar hasil analisis data reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian studi kasus ditemukan penguatan keterlibatan warga negara untuk mewujudkan *good governance* dilakukan di desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan melaksanakan program Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API PRB) dengan persiapan pemberdayaan dan pelaksanaan pemberdayaan. Persiapan pemberdayaan dengan memberikan wawasan secara teori berupa kegiatan sosialisasi sekaligus dibentuk sebuah forum API PRB yang ditujukan untuk mengakomodir warga dalam kegiatan- kegiatan yang terkait API PRB, kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan diberikan pelatihan terkait API PRB seperti melakukan reboisasi, mengelola sampah, membuat kompos, mendampingi dalam musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa agar API PRB dimasukkan dalam RPJM Desa.

Kata kunci:

Warga Negara,
Pemerintah Desa, *Good governance*.

Artikel ;

Diterima: 22 Mei 2025
Diperbaiki: 23 Mei 2025
Diterbitkan: 26 Mei 2025

PENDAHULUAN

Partisipasi warga negara dalam pemerintahan lokal merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, desa sebagai pemerintahan paling bawah memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi warga secara langsung dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Pemerintah desa menjadi aktor utama yang dapat mendorong keterlibatan warga negara secara lebih efektif. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah melalui pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan lokal, seperti



perubahan iklim dan risiko bencana. Studi oleh Widianingsih & Morrell (2007) menunjukkan bahwa model pembangunan partisipatif yang dijalankan di tingkat desa mampu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penguatan keterlibatan warga negara melalui peran Pemerintah Desa dapat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Untuk itu, digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang memungkinkan pemahaman yang mendalam atas dinamika sosial dan politik lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi, yang merupakan metode penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan validitas temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk menemukan konsistensi. Teknik analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data (*display*), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Studi kasus ini dilakukan di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Desa ini dipilih karena memiliki praktik menarik dalam pelibatan masyarakat melalui program Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB). Program ini tidak hanya mengedepankan aspek teknis adaptasi, tetapi juga menekankan pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tahap awal penguatan keterlibatan warga dilakukan melalui persiapan pemberdayaan, yakni pemberian wawasan dan pengetahuan teoretis kepada masyarakat. Dalam tahap ini, Pemerintah Desa Ngroto menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan konsep API-PRB kepada warga. Kegiatan ini merupakan bentuk pendidikan publik yang penting dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Sebagai bagian dari persiapan, Pemerintah Desa juga membentuk Forum API-PRB yang bertujuan mengakomodasi aspirasi dan partisipasi warga dalam kegiatan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana. Forum ini menjadi wadah deliberatif yang memungkinkan warga berperan langsung dalam menyusun rencana dan mengambil keputusan. Konsep ini sesuai dengan gagasan deliberative democracy sebagaimana dikemukakan oleh Habermas.

Dalam tahap pelaksanaan pemberdayaan, warga diberi pelatihan praktis yang berkaitan dengan adaptasi iklim, seperti reboisasi, pengelolaan sampah, dan pembuatan kompos. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis warga, tetapi juga mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Penelitian oleh Ardiansyah et al. (2019) menunjukkan bahwa pelatihan lingkungan berbasis masyarakat dapat memperkuat aksi kolektif untuk keberlanjutan.

Warga juga dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Keterlibatan ini penting untuk memastikan program API-PRB masuk dalam dokumen perencanaan formal, sehingga memperoleh legitimasi administratif dan



anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan inklusivitas dalam *good governance*.

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa ketika warga terlibat aktif dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan program, maka kepercayaan publik terhadap Pemerintah Desa meningkat. Selain itu, kualitas kebijakan publik yang dihasilkan juga cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Fenomena ini sejalan dengan kajian oleh Evans (2012) yang menyatakan bahwa keterlibatan warga memperkuat kapasitas tata kelola lokal.

Pengalaman Desa Ngroto menggambarkan bagaimana sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menjadi praktik baik dalam membangun tata kelola yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas warga melalui pemberdayaan terbukti menjadi strategi kunci dalam menciptakan desa yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana, sekaligus memperkuat prinsip *good governance*.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif Pemerintah Desa dalam membangun ruang partisipatif dan memberdayakan warga sebagai subjek pembangunan. Melalui kombinasi antara pendidikan publik, pembentukan forum partisipatif, pelatihan praktis, dan pelibatan dalam perencanaan, keterlibatan warga negara dapat diperkuat secara berkelanjutan. Hal ini merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis dan berorientasi pada keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus, penelitian ini dilakukan di desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Subjek penelitian dalam penelitian terdiri dari Pemerintah desa Ngroto, dan warga desa Ngroto. Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian menjalankan secara prosedur yang mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, menentukan pembatasan masalah, menetapkan fokus penelitian, menentukan teknik pengumpulan data, menetapkan teknik pengolahan data, memunculkan teori-teori yang terkait dengan penelitian dan pelaporan data atau hasil penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, pada pengumpulan data pada saat penelitian dengan cara mengobservasi secara langsung terkait kegiatan-kegiatan di tempat penelitian dan dilakukan wawancara secara langsung kepada informan dengan tatap muka serta dokumentasi untuk mendukung data penelitian. Dilakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi sebagai teknik analisis data dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan warga negara dalam pembangunan desa telah menjadi kebutuhan mendasar dalam era desentralisasi dan demokratisasi saat ini. Keterlibatan tersebut bukan hanya dalam bentuk kehadiran fisik dalam forum-forum musyawarah, melainkan juga berupa keterlibatan substantif dalam perumusan agenda pembangunan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan dan pengawasan



kebijakan desa. Pemerintah Desa Ngroto memahami betul bahwa penguatan peran serta warga merupakan instrumen utama untuk mencapai good governance. Dalam konteks ini, penguatan tidak hanya bersifat simbolik, melainkan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sebagaimana ditekankan oleh Mulyawan (2012), bahwa dukungan dan penguatan kepada warga menjadi fondasi kuat terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efektif.

Desa Ngroto, yang berada di kawasan dengan potensi bencana tinggi seperti longsor dan banjir, menjadi wilayah yang memerlukan strategi pembangunan berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana. Pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Oleh karena itu, pelibatan warga dalam program Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API PRB) merupakan langkah strategis. Kajian Hadi dan Nugroho (2020) membuktikan bahwa komunitas lokal memiliki potensi besar dalam penanganan risiko bencana apabila mereka dilibatkan dalam proses perencanaan hingga evaluasi program.

Salah satu pendekatan yang dilakukan Pemerintah Desa Ngroto untuk membangun kesadaran dan keterlibatan warga adalah melalui penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas tersebut dilakukan secara bertahap dan dimulai dari tahap persiapan pemberdayaan. Dalam tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap program API PRB dengan pendekatan langsung kepada warga melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok strategis lainnya. Hal ini dilakukan mengingat kekuatan sosial dan budaya di desa masih sangat mempengaruhi pola perilaku warga. Pendekatan ini selaras dengan temuan Widianingsih dan Morrell (2007) yang menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan partisipatif sangat dipengaruhi oleh peran aktor-aktor lokal yang dipercaya oleh masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan tidak bersifat satu arah, melainkan bersifat dialogis dan partisipatif. Warga diberi ruang untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan memberikan kritik terhadap program yang ditawarkan. Melalui forum ini, warga merasa dihargai dan dilibatkan secara utuh dalam proses pengambilan keputusan. Sosialisasi ini juga membentuk forum API PRB yang menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antara warga dan pemerintah desa. Habermas (1996) menekankan pentingnya ruang diskursif yang memungkinkan terjadinya komunikasi rasional untuk mencapai kesepakatan kolektif dalam masyarakat demokratis.

Pembentukan forum API PRB juga ditandai dengan deklarasi komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan. Ini menunjukkan bahwa program tidak hanya ditujukan untuk jangka pendek, melainkan membangun kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan. Proses deklaratif semacam ini berfungsi sebagai simbol legitimasi sosial atas sebuah program. Ardiansyah et al. (2019) mengungkapkan bahwa pendekatan simbolik dan struktural secara bersamaan terbukti efektif dalam mengubah perilaku masyarakat terhadap isu lingkungan.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pemberdayaan, yang menjadi kunci dalam transformasi peran warga dari objek menjadi subjek pembangunan. Warga



diberi pelatihan teknis terkait pengelolaan sampah, pembuatan kompos cair, dan kegiatan reboisasi. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis warga, tetapi juga memperkuat kepekaan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, warga didorong untuk menjadi bagian dari solusi atas permasalahan lingkungan yang dihadapi desa mereka. Hal ini memperkuat civic skills sebagaimana dimaksud dalam pendidikan kewarganegaraan modern.

Pemberdayaan ini memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif yang dilakukan Pemerintah Desa Ngroto bersifat transformatif, tidak hanya transaksional. Warga tidak diberi "hadiah" pembangunan, melainkan diberikan alat untuk membangun kapasitas mereka sendiri. Prinsip ini dikenal dalam literatur pembangunan sebagai pendekatan empowerment, yang menurut Narayan (2002), merupakan proses memberikan daya kepada masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri.

Di samping pelatihan teknis, warga juga dilibatkan dalam proses perencanaan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam musyawarah ini, warga ikut merancang arah pembangunan jangka menengah dengan memasukkan isu-isu perubahan iklim dan kebencanaan ke dalam prioritas pembangunan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa warga tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga perancang kebijakan. Ini mencerminkan perwujudan dari *civic knowledge* dalam dimensi PKn, di mana warga paham proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

Kegiatan ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Desa Ngroto telah menjalankan prinsip transparency dan accountability, yang merupakan dua prinsip fundamental dari good governance. Addink (2019) menyatakan bahwa sebuah pemerintahan yang baik harus mampu menjelaskan setiap kebijakan yang diambil kepada publik, dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi semua pihak dalam prosesnya.

Keterlibatan warga dalam forum perencanaan juga memperkuat semangat kolektivitas dan gotong royong. Masyarakat tidak lagi menunggu bantuan dari pemerintah atas masalah-masalah yang mereka hadapi, melainkan bersama-sama mencari solusi dan bertindak secara kolektif. Hal ini mengubah budaya ketergantungan menjadi budaya kemandirian, yang menjadi syarat mutlak dalam pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya forum yang terorganisir, masyarakat juga mulai membentuk sistem pengawasan mandiri terhadap implementasi program. Ini memperkuat aspek pengawasan sosial (*social accountability*), yang sangat penting dalam mencegah penyimpangan dan memastikan keberhasilan program pembangunan. Sebagaimana diungkap oleh De Guimarães et al. (2020), pengawasan sosial merupakan instrumen yang efektif untuk meningkatkan integritas tata kelola pemerintahan lokal.

Partisipasi dalam penyusunan RPJM Desa bukan hanya kegiatan prosedural, tetapi menjadi ruang pembelajaran demokrasi bagi warga. Dalam forum-forum ini, warga belajar menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, dan mengambil



keputusan bersama. Inilah pendidikan kewarganegaraan dalam praktik nyata, yang memperkuat civic disposition atau sikap kewargaan warga.

Penerapan *civic disposition* dalam konteks ini terlihat dari meningkatnya kepedulian warga terhadap lingkungan dan komitmen mereka dalam menjalankan program yang telah dirancang bersama. Warga menjadi lebih proaktif dalam menjaga kelestarian alam, membentuk kelompok kerja, serta menginisiasi kegiatan yang mendukung tujuan API PRB secara sukarela. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan telah berhasil menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial.

Lebih jauh lagi, pelibatan warga secara utuh dalam program ini memperlihatkan adanya hubungan timbal balik yang sehat antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa tidak sekadar memerintah, tetapi berperan sebagai fasilitator dan pendamping yang menyediakan ruang dan sumber daya. Sementara masyarakat bertindak sebagai mitra aktif, bukan objek pembangunan.

Pemerintah Desa Ngroto dengan sengaja mengadopsi pendekatan partisipatif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini menjawab kritik terhadap model pembangunan top-down yang selama ini dianggap gagal menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Evans (2012) menekankan bahwa pembangunan yang berbasis pada institusi lokal dan partisipasi masyarakat terbukti lebih berkelanjutan.

Hasil nyata dari penguatan keterlibatan warga terlihat dari menurunnya tingkat kerusakan lingkungan akibat penebangan liar, meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah, serta terbentuknya beberapa kelompok kerja yang secara mandiri mengelola kompos dan kegiatan penghijauan. Ini bukan hanya hasil fisik, tetapi mencerminkan perubahan perilaku yang substantif.

Selain manfaat lingkungan, partisipasi dalam program API PRB juga meningkatkan kohesi sosial antarwarga. Proses musyawarah, kerja kelompok, dan kegiatan gotong royong memperkuat solidaritas sosial. Dalam jangka panjang, hal ini akan menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan pembangunan lainnya.

Pengalaman di Desa Ngroto menunjukkan bahwa pelibatan warga dalam program berbasis lingkungan dapat menjadi titik masuk strategis untuk memperkuat demokrasi lokal. Melalui isu yang konkrit dan menyentuh kehidupan sehari-hari, warga merasa lebih dekat dengan proses pemerintahan dan termotivasi untuk terus berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan.

Keberhasilan ini perlu dijadikan pembelajaran bagi desa-desa lain, bahwa good governance dapat diwujudkan bukan melalui birokrasi yang kaku, tetapi melalui partisipasi warga yang tulus dan terorganisir. Dengan memberikan ruang partisipatif yang inklusif dan memberdayakan, desa tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kokoh.

Dengan demikian, penguatan keterlibatan warga negara dalam konteks Desa Ngroto telah menjadi bukti konkret bahwa good governance dapat diraih melalui pendekatan berbasis pemberdayaan dan partisipasi. Pemerintah desa yang mampu memfasilitasi proses tersebut akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari warganya,



sementara warga akan merasa memiliki ruang dan peran dalam membentuk masa depan desa mereka secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penguatan keterlibatan warga negara untuk mewujudkan *good governance* terdapat tahap persiapan pemberdayaan dilakukan untuk mempersiapkan dari sisi kemampuan pengetahuan warga terkait program API PRB yang bermanfaat dalam mengelola desa yang baik dengan melaksanakan sosialisasi, membentuk forum, deklarasi. Sedangkan tahap pelaksanaan pemberdayaan adalah diberikan pelatihan secara nyata untuk meningkatkan keterampilan warga seperti mengolah sampah menjadi kompos, reboisasi, musyawarah bersama membahas RPJM desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, H. (2019). *Good Governance: Concept and Context*. Oxford University Press.
- Ahrari, M., Hassan, M. S. B. H., Othman, J. B., Samah, B. A., D'Silva, J. L., & Uli, J. (2016). Empowering rural communities through collective action for environmental conservation. *Environment, Development and Sustainability*, 18(4), 1097-1113. <https://doi.org/10.1007/s10668-015-9692-z>
- Ardiansyah, F., Ekayani, M., & Sunito, S. (2019). Strategi adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana. *Jurnal Penyuluhan*, 15(1), 63-75. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v15i1.23452>
- Cogan, John J. and Ray Derricot. 1988. *Citizenship for the 21 St Century: An International Perspective on Education*. London: Cogan Page.
- Delina, Laurence L. and Benjamin K. Sovacool. 2018. "Of Temporality and Plurality: An Epistemic and Governance Agenda for Accelerating Just Transitions for Energy Access and Sustainable Development." *Current Opinion in Environmental Sustainability* 34:1-6.
- De Guimarães, Julio Cesar Ferro, Eliana Andréa Severo, Luiz Antonio Felix Júnior, Wênyka Preston Leite Batista Da Costa, and Fernanda Tasso Salmoria. 2020. "Governance and Quality of Life in Smart Cities: Towards Sustainable Development Goals." *Journal of Cleaner Production* 253.
- De Guimarães, J. C. F., Severo, E. A., de Vasconcelos, C. R. M., & Alves, D. F. R. (2020). Governance and sustainability: Proposal of an integrative model. *Journal of Cleaner Production*, 260, 121057. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121057>



- Evans, P. (2012). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.
- Gusmadi, Setiawan. 2018. "Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 9(1):105-17.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hadi, S. P., & Nugroho, I. (2020). Peran komunitas dalam pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 21-35. <https://doi.org/10.22146/jsp.44286>
- Mulyawan, R. (2012). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan: Dari teori ke praktik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2), 120-132. <https://doi.org/10.22146/jsp.10998>
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and poverty reduction: A sourcebook*. World Bank Publications.
- Praharaj, Sarbeswar, Jung Hoon Han, and Scott Hawken. 2017. "Innovative Civic Engagement and Digital Urban Infrastructure: Lessons from 100 Smart Cities Mission in India." *Procedia Engineering* 180:1423-32.
- Purdy, Simon J. 2017. "Computers in Human Behavior Internet Use and Civic Engagement : A Structural Equation Approach." *Computers in Human Behavior* 71:318-26.
- Rahayu, Ani Sri. 2016. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan(PPKn)*. Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara.
- Richard, Elelman and L. Feldman David. 2018. "The Future of Citizen Engagement in Cities – The Council of Citizen Engagement in Sustainable Urban Strategies (ConCensus)." *Futures* 101:80- 91
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). Participatory planning in Indonesia: Seeking a new path to democratic development. *Policy Studies*, 28(1), 1-15. <https://doi.org/10.1080/01442870601121456>